



# LAPORAN

## SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP) DAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) BPSI TANAMAN SEREALIA TRIWULAN 1 2024

Nomor : 28.01/HM.100/H.2.3/03/2024  
Tanggal : 28 Maret 2024



## **LEMBAR PENGESAHAN**

# **LAPORAN SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN DAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGGUNA LAYANAN DI BPSI TANAMAN SEREALIA**

**Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi  
Nomor 90 Tahun 2021**

**Disahkan di Maros  
Maret 2024**

**Kepala BPSI Tanaman Serealia**

*Ditandatangani secara elektronik*

**Dr. Amin Nur, S.P., M.Si.**

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, mengamanatkan fokus pembangunan Zona Integritas (ZI) yang tertuju pada dua sasaran yang utama, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik yang prima. Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui komponen pengungkit terhadap 6 (enam) area perubahan dan komponen hasil melalui Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP). SPAK dan SPKP dilakukan terhadap pengguna layanan (pemangku kepentingan) dari unit/satuan kerja instansi pemerintah.

Survei tentang persepsi mitra kerja/pengguna layanan dan persepsi anti korupsi terhadap pelayanan yang diberikan, yang berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 dilakukan untuk mengetahui kualitas pelayanan dan anti korupsi BPSI Tanaman Serealia sebagai salah satu unit kerja yang sedang melakukan pembangunan ZI.

Hasil survei tersebut akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi balai selaku penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan upaya perbaikan, sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera tercapai.

Maros, 28 Maret 2024

Kepala BPSI Tanaman Serealia,

*Ditandatangani secara elektronik*

Dr. Amin Nur, S.P., M.Si.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>II</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>III</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>IV</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	2
C. Sasaran.....	2
D. Landasan Hukum .....	2
E. Definisi .....	3
<b>BAB II METODOLOGI SURVEI .....</b>	<b>4</b>
A. Kriteria Responden .....	4
B. Metode Pencacahan .....	4
C. Metode Pengolahan Data dan Analisis .....	5
<b>BAB III PENGOLAHAN SURVEI .....</b>	<b>6</b>
A. Analisis Hasil Survei.....	6
B. Tindak Lanjut Hasil Survei .....	9
<b>BAB IV DATA.....</b>	<b>10</b>
A. Data Responden .....	10
B. Data Dukung Lainnya.....	11
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>12</b>
A. Kesimpulan .....	12

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Sistem penyelenggaraan pemerintahan di setiap kementerian/lembaga (K/L) diharuskan berorientasi sepenuhnya terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, setiap K/L diharuskan mengambil Langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan salah satunya adalah dengan meningkatkan mutu pelayanan publik dalam rangka menilai komitmen terhadap pencegahan korupsi. Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Permentan dan RB Nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap K/L.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik efisien dan efektif sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat tepat dan professional. Badan Standarisasi Instrumen Pertanian sebagai unit eselon 1 penyelenggara pelayanan publik maka penting dilakukan survei indeks persepsi kualitas pelayanan (IPKP) dan survey indeks persepsi anti korupsi (IPAK) sebagai dukungan dan peran aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi. IPKP dan IPAK merupakan instrumen pengukuran tingkat korupsi untuk instalasi pemerintah di Indonesia yang dikembangkan oleh transparansi internasional Indonesia. Hasil survei dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk peningkatan kualitas layanan serta mewujudkan pelaksanaan *Good Government*. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi dan

pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkup Badan standardisasi instrumen pertanian.

## **B. Tujuan**

Tujuan survei persepsi kualitas pelayanan dan survei persepsi anti korupsi adalah untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan pada BPSI Tanaman Serealia sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas korupsi.

## **C. Sasaran**

Sasaran survei persepsi kualitas pelayanan dan survei persepsi anti korupsi sebagai berikut:

1. Terselenggaranya pelayanan publik yang bersih akuntabel dan transparan
2. Tercapainya perbaikan sistem mekanisme dan prosedur pelayanan publik sesuai yang diharapkan pengguna layanan sehingga pelayanan dilaksanakan secara bersih bebas dari korupsi kolusi nepotisme dan anti gratifikasi

## **D. Landasan Hukum**

Landasan hukum survei persepsi kualitas pelayanan dan survei persepsi anti korupsi sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019

#### **E. Definisi**

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bahwa Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sembilan tindakan korupsi terdiri dari:

1. Penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara
2. Swap
3. Illegal profit
4. Secret transaction
5. Hadiah
6. Hibah
7. Penggelapan
8. Kolusi
9. Nepotisme

## BAB II METODOLOGI

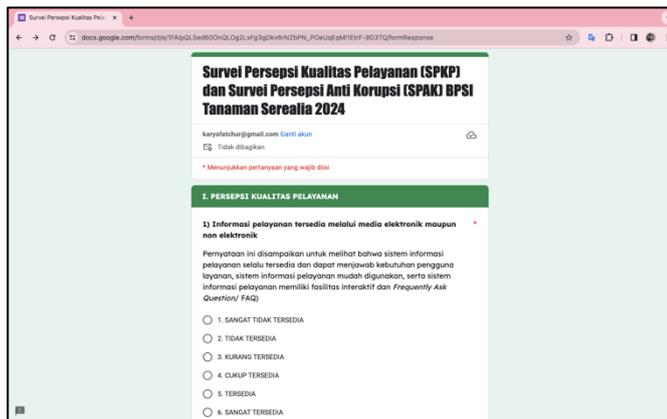
### A. Kriteria Responden

Responden yang berpartisipasi dalam survei adalah pengguna jasa yang telah selesai (100%) menerima layanan di BPSI Tanaman Serealia dalam Triwulan I 2024 (1 Januari – 31 Maret 2024).

### B. Metode Pencacahan

Survei dilakukan dengan metode penyampaian kuesioner melalui surat dan/atau media komunikasi lainnya kepada para responden. BPSI Tanaman Serealia melaksanakan survei dari tanggal 3 Januari – 28 Maret 2024, melalui tautan [bit.ly/SPAKBSIPSerealia](https://bit.ly/SPAKBSIPSerealia).

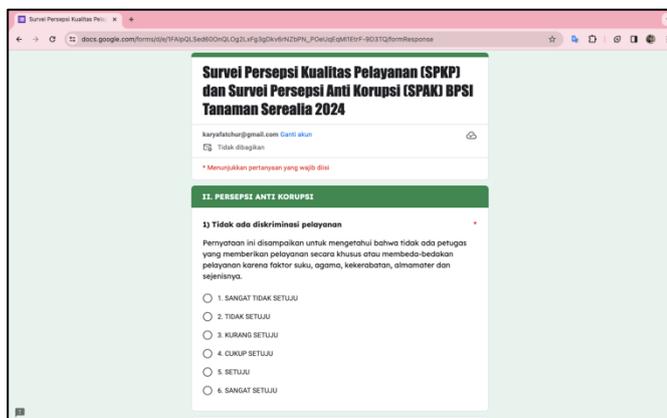
#### 1. Tampilan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (SPKP)



The screenshot shows a Google Forms interface for a survey titled "Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) BPSI Tanaman Serealia 2024". The form is in Indonesian. It includes a header with the survey title, a sender email (karyafachur@gmail.com), and a "Tidak dibagikan" (Not shared) status. Below the header, there is a section titled "I. PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN" (Perception of Service Quality). The first question (1) asks about the availability of information services through electronic or non-electronic media. The question text is: "1) Informasi pelayanan tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik". Below the question, there is a statement: "Pernyataan ini disampaikan untuk melihat bahwa sistem informasi pelayanan selalu tersedia dan dapat menjawab kebutuhan pengguna layanan, sistem informasi pelayanan mudah digunakan, serta sistem informasi pelayanan memiliki fasilitas interaktif dan Frequently Ask Question/ FAQ". At the bottom of the question, there are six radio button options: 1. SANGAT TIDAK TERSEDIA, 2. TIDAK TERSEDIA, 3. KURANG TERSEDIA, 4. CUKUP TERSEDIA, 5. TERSEDIA, and 6. SANGAT TERSEDIA.

Gambar 1. Tampilan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Publik

#### 2. Tampilan Survei Persepsi Antikorupsi (SPAK)



The screenshot shows the same Google Forms interface as in Gambar 1, but it is scrolled down to the second section titled "II. PERSEPSI ANTI KORUPSI" (Perception of Anti-Corruption). The first question (1) asks about the absence of discrimination in services. The question text is: "1) Tidak ada diskriminasi pelayanan". Below the question, there is a statement: "Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui bahwa tidak ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sebagainya". At the bottom of the question, there are six radio button options: 1. SANGAT TIDAK SETUJU, 2. TIDAK SETUJU, 3. KURANG SETUJU, 4. CUKUP SETUJU, 5. SETUJU, and 6. SANGAT SETUJU.

Gambar 2. Tampilan Survei Persepsi Antikorupsi

### **C. Metode Pengolahan Data dan Analisis**

Skala pengukuran yang digunakan pada survei ini adalah skala *likert* dengan 6 pilihan. Skala *likert* merupakan skala atau pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai sebuah peristiwa dan fenomena sosial, berdasarkan dengan kuesioner yang telah diberikan. Semakin tinggi nilai yang diberikan, menunjukkan semakin baik persepsi masyarakat terhadap kuesioner yang diberikan.

Data yang didapat dari hasil kuesioner dikonversikan menjadi nilai dengan 4 skala karena menggunakan skala Likert genap 4 poin yaitu empat, tiga, dua, dan satu. Presentase kelayakan didapat dengan menghitung secara matematis menggunakan persamaan rating scale seperti di bawah ini.

Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) menggunakan skala 4, sedangkan kuesioner pada masing-masing survei menggunakan skala 6. Oleh karena itu, perlu dilakukan konversi nilai dari skala 6 ke skala 4.

## BAB III PENGOLAHAN SURVEI

### A. Analisis Hasil Survei

#### 1. Jumlah Responden SPKP dan SPAK

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 48 responden, dengan identifikasi berikut:

**Tabel 1. Rekap Indikator Responden SPKP dan SPAK**

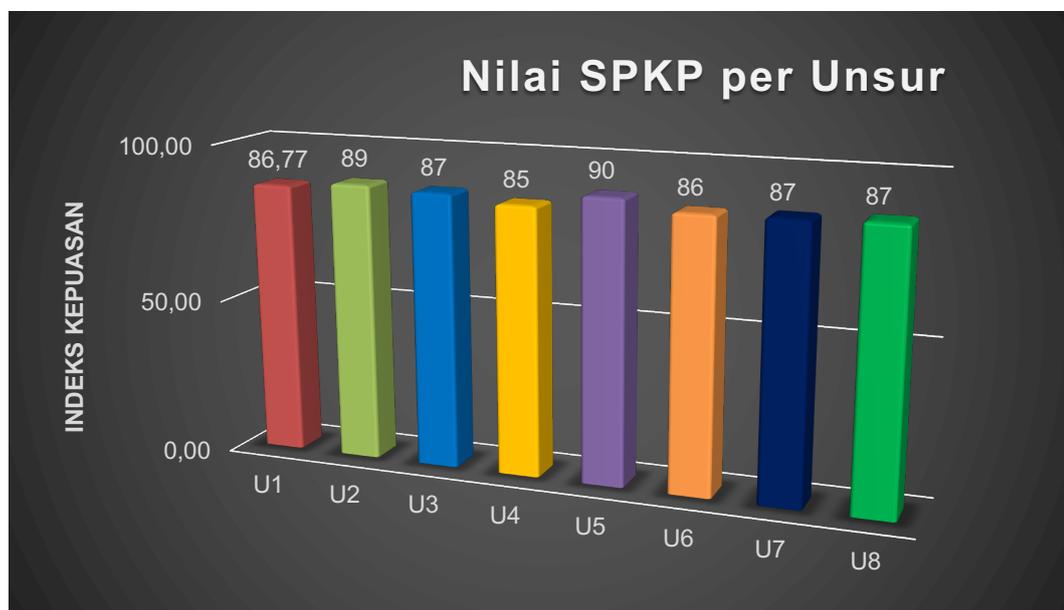
No	Karakteristik	Indikator	Jumlah	Persentase
1	Usia	Kurang dari 20 tahun	8	17%
		20 s.d. 30 tahun	16	33%
		30 s.d. 40 tahun	4	8%
		40 s.d. 50 tahun	13	27%
		Lebih dari 50 tahun	7	15%
2	Jenis Kelamin	Laki - laki	27	56%
		Perempuan	21	44%
3	Pendidikan	SD	0	0%
		SMP/ sederajat	1	2%
		SMA/ sederajat	9	19%
		D3	0	0%
		S1/ sederajat	21	44%
		S2	13	27%
4	Profesi	S3	4	8%
		ASN	18	38%
		TNI/POLRI	0	0%
		Swasta	4	8%
		Wirausaha	6	13%
		Pelajar/ Mahasiswa	20	42%
		BUMN	0	0%
DPR/DPD	0	0%		
5	Layanan	Laboratorium Pengujian	1	2%
		Unit Pengelola Benih Sumber	19	40%
		Informasi Teknologi	6	13%
		Kunjungan/ Studi Banding	8	17%
		Perpustakaan	2	4%
		Magang/PKL	11	23%

#### 2. Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan

Hasil pengolahan data Survei Persepsi Kualitas Pelayanan ditampilkan pada Tabel 2. Rekap Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan, sebagai berikut:

**Tabel 2. Rekap Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan**

No	Unsur Persepsi Kualitas Pelayanan	Rerata	%
1	Informasi Pelayanan	3,47	86,77
2	Persyaratan Pelayanan	3,54	88,51
3	Prosedur/Alur Pelayanan	3,50	87,48
4	Jangka Waktu	3,42	85,39
5	Tarif/Biaya Layanan	3,58	89,56
6	Sarana dan Prasarana	3,46	86,43
7	Respons Pelayanan	3,47	86,78
8	Konsultasi dan Pengaduan	3,50	87,48
<b>Jumlah Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan</b>		<b>3,49</b>	<b>87,30</b>



Gambar 3. Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan per Unsur

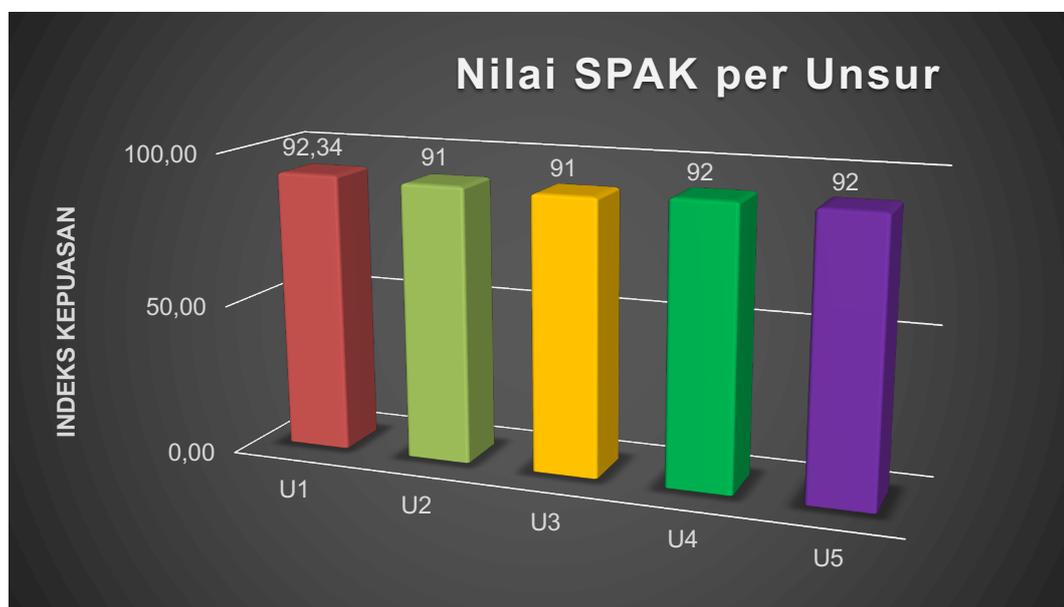
Berdasarkan dari hasil rekapitulasi data, diperoleh nilai IPKP sebesar **3,49** atau **87,30** yang termasuk ke dalam kategori **Sangat Baik (88,31 – 100)**. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh BPSI Tanaman Serealia telah memberikan kepuasan kepada pengguna jasa. Namun terlihat unsur U4 yaitu **jangka waktu** mendapatkan indeks penilaian yang paling kecil sebesar 3,42 atau 85,39% dibandingkan dengan unsur lainnya. Keadaan tersebut dimungkinkan karena **jangka waktu** penyelesaian pelayanan yang diberikan BPSI Tanaman Serealia belum sesuai dengan Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan.

### 3. Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi

Dari hasil pengolahan data SPAK, diperoleh nilai Indeks Persepsi Antikorupsi (IPAK) sebesar 3,66, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Rekap Indeks Persepsi AntiKorupsi

No	Unsur Persepsi Antikorupsi	Rerata	%
1	Diskriminasi Pelayanan	3,69	92,34
2	Indikasi Kecurangan dalam Pelayanan	3,65	91,29
3	Praktik Pemberian Imbalan Uang/Barang	3,62	90,59
4	Praktik Pungutan Liar (Pungli)	3,68	91,98
5	Praktik Percaloan/Perantara/Biro	3,67	91,63
<b>Jumlah Indeks Persepsi Antikorupsi</b>		<b>3,66</b>	<b>91,57</b>



Gambar 4. Nilai Indeks Persepsi Antikorupsi per Unsur

Berdasarkan dari hasil rekapitulasi data, diperoleh nilai IPAK sebesar **3,66** atau **91,57** yang termasuk ke dalam kategori **Bersih dari Korupsi (88,31 – 100)**. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna jasa percaya bahwa penyelenggaraan birokrasi di BPSI Tanaman Serealialia bebas dari korupsi. Namun terlihat unsur U3 yaitu **praktik pemberian imbalan uang/barang** mendapatkan indeks penilaian yang paling kecil sebesar 3,62 atau 90,59% dibandingkan dengan unsur lainnya. Keadaan tersebut dimungkinkan karena masih ada **praktik pemberian imbalan uang/barang** dari pihak

mitra meski tanpa diminta dan kemungkinan hal tersebut terjadi sangatlah kecil.

**Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku**

Pernyataan tersebut disampaikan untuk mengetahui bahwa tidak ada petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, rokok, transport, kopi dll; pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan dll; pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort, perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja dll.

**B. Tindak Lanjut Hasil Survei**

Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia memperoleh hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Publik sebesar **3,49 atau 87,30** dan hasil Survei Persepsi Anti Korupsi sebesar **3,66 atau 91,57**. Perolehan ini perlu dipertahankan dengan melakukan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Rencana tindak lanjut pada unsur-unsur yang memperoleh nilai terkecil adalah dengan menyelenggarakan pelatihan budaya pelayanan prima (*services excellent*), penyediaan kotak pengaduan dan saran, serta peningkatan pengendalian atas penugasan pengawasan secara berjenjang.

## BAB IV DATA SURVEI

### A. Data Responden

No	Nama	Layanan
1	Fariz	Informasi Teknologi
2	Suratmi	Unit Pengelola Benih Sumber (Pembelian Benih)
3	Wiwid	Unit Pengelola Benih Sumber (Pembelian Benih)
4	Sulhan	Unit Pengelola Benih Sumber (Pembelian Benih)
5	Nurwindah Pujilestari	Unit Pengelola Benih Sumber (Pembelian Benih)
6	Yuli Tarmuji	Unit Pengelola Benih Sumber (Pembelian Benih)
7	Repelita Kallo	Unit Pengelola Benih Sumber (Pembelian Benih)
8	Sumarni Panikkai	Unit Pengelola Benih Sumber (Pembelian Benih)
9	Sundari	Unit Pengelola Benih Sumber (Pembelian Benih)
10	Kusmea Dinata	Unit Pengelola Benih Sumber (Pembelian Benih)
11	Ammini Amrina Saragih	Kunjungan/Studi Banding
12	Wasirin	Unit Pengelola Benih Sumber (Pembelian Benih)
13	Gaspar Bao	Unit Pengelola Benih Sumber (Pembelian Benih)
14	Patta Sija	Kunjungan/Studi Banding
15	Amiyarsi Mustika Yukti	Unit Pengelola Benih Sumber (Pembelian Benih)
16	Junaidi Muntoyib	Unit Pengelola Benih Sumber (Pembelian Benih)
17	Muh. Taufiq Hidayat. A, S.Pd	Magang/PKL
18	Aisyah HZ, S.Pd.	Magang/PKL
19	Natalia Yosephine	Unit Pengelola Benih Sumber (Pembelian Benih)
20	Willy Y. Tandirerung	Magang/PKL
21	Morina Pasaribu	Informasi Teknologi
22	Jamaya Halifah	Informasi Teknologi
23	Rasidin Azwar	Unit Pengelola Benih Sumber (Pembelian Benih)
24	Zakaria	Unit Pengelola Benih Sumber (Pembelian Benih)
25	Qayyimatun Nasriyah	Informasi Teknologi
26	Rana Wijaya	Unit Pengelola Benih Sumber (Pembelian Benih)
27	Sugihyanto	Kunjungan/Studi Banding
28	Rifki Pratama	Kunjungan/Studi Banding
29	Safitri	Kunjungan/Studi Banding
30	Wahyu Setiawan Judu	Kunjungan/Studi Banding
31	Aditia Iatawa	Kunjungan/Studi Banding
32	Wilda Srianti	Kunjungan/Studi Banding
33	Dr. Achmad Amzeri, SP., MP	Unit Pengelola Benih Sumber (Pembelian Benih)
34	Muhammad Aswad S	Magang/PKL
35	Khamim Tohari SP.SH.	Unit Pengelola Benih Sumber (Pembelian Benih)
36	Ufiya	Informasi Teknologi
37	M. Septo Aditya, S.Tr.P	Informasi Teknologi
38	Akbar Wijaya	Magang/PKL
39	Muh. Khaidir Maulana Rifai	Magang/PKL
40	Anastasia Limbong P	Magang/PKL
41	Husain	Magang/PKL
42	Egi Putri Wahyuni	Magang/PKL
43	Rahmawati Bari'	Magang/PKL
44	Alira mirnawati	Magang/PKL
45	Zahra Nurul Hikmah	Perpustakaan
46	Muh. Rifsang Adham	Perpustakaan
47	Muh. Sidik Fikram	Laboratorium Pengujian
48	Fatimah Azzahra	Perpustakaan

## B. Data Dukung Lainnya

Tautan dan barcode survei: [bit.ly/SPAKBSIPSereal](https://bit.ly/SPAKBSIPSereal)



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BPSI TANAMAN SEREALIA

**Survei SPKP dan SPAK  
BPSI Tanaman Sereal**

atau klik [bit.ly/SPAKBSIPSereal](https://bit.ly/SPAKBSIPSereal)

SIGAP: Senyum, Ikhlas, Gesit, Aktif, Profesional  
[www.serealibsip.pertanian.go.id](http://www.serealibsip.pertanian.go.id)

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Secara umum, hasil survei persepsi kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia memperoleh nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan sebesar **3,49** atau masuk kategori **Sangat Baik** (kisaran nilai 3.26 - 4.00). Dengan demikian, petugas pelayanan BPSI Tanaman Serealia telah memberikan pelayanan dengan baik, transparan, bersih, dan akuntabel.
2. Selanjutnya, survei persepsi anti korupsi mendapatkan nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi sebesar **3,66** atau masuk kategori **Bersih dari Korupsi** (kisaran nilai 3.26 - 4.00). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sebagai pengguna layanan telah mempercayai BPSI Tanaman Serealia sebagai penyelenggaraan layanan yang bebas dari korupsi.
3. Indikator yang perlu ditingkatkan kualitasnya antara lain melakukan pelayanan yang cepat, tepat, dan cermat sesuai dengan Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan. Sehingga pelayanan dapat dilaksanakan **tepat waktu**. Kemudian melakukan perbaikan pada pengawasan dan perbaikan prosedur guna meminimalisasi **praktik pemberian imbalan uang/barang/hadiah**.